

PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU

Oleh:

Robi Marwanaya
e-mail : robimarwana11@gmail.com

Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761)63277

Abstract

Increasing the sheer number of residents and the boom the number of vehicles in the city of Pekanbaru is increasingly require adequate infrastructure support mainly in order to improve road infrastructure development, the Government of Pekanbaru City through the Department of Highways and Water Resources Pekanbaru for more attention to the condition of the road - the road existing as well as monitoring the roads - roads in the city of Pekanbaru. Where there are still many roads are damaged and not repaired so as to disturb the comfort of road users.

The problem in this research is how the supervision of road infrastructures by the Department of Highways and Water Resources Pekanbaru city, as well as the factors - factors inhibiting the supervision of road infrastructure.

The researchers used theoretical concept which adopted the theory of supervision by Manullang. The method used in this research is descriptive qualitative data collection instrument includes interviews with employees monitoring section of Highways and Water Resources Pekanbaru and society, observation and document data.

The results showed that the implementation of road infrastructure supervision by the Department of Highways and Water Resources Pekanbaru is still not optimal. It is seen from the results of interviews and observations that researchers do in the office of the Department of Highways and Water Resources Pekanbaru, and coupled with public opinion revealed that the work of Highways and Water Resources was Pekanbaru is less satisfactory for them, because according to they still lack the performance conducted by the Department of Highways and Water Resources during this Pekanbaru.

Keywords: Monitoring and Road Infrastructure

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses

pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur disamping memiliki keterkaitan dan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur dan berfungsi baik, mempunyai tingkat kesejahteraan social dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang minim dan tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan masalah social dan lingkungan. Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada tidak hanya diwilayah Provinsi Riau. Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan vital dan mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain – lain.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pasal 2 sampai dengan pasal 4 menjelaskan bahwa Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti; pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar – benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air. Dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya.

Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat, sedangkan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air . jadi Infrastruktur jalan merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem guna mewujudkan prasarana transportasi darat sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

Jalanan kota di Pekanbaru saat ini banyak yang memprihatinkan, kita sering menjumpai kerusakan jalan pada suatu ruas jalan, kerusakan ini

bermacam-macam umumnya ada kerusakan jalan berupa retak-retak (cracking), berupa gelombang (corrugation), juga kerusakan berupa alur/ cekungan arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan (rutting) ada juga berupa genangan aspal dipermukaan jalan (bleeding), dan ada juga berupa lubang-lubang (pothole). Kerusakan tersebut bias terjadi pada permukaan jalan yang menggunakan beton aspal sebagai lapisan permukaannya. Penyebab kerusakan jalan adalah akibat beban roda kendaraan berat yang lalu lalang (berulang – ulang), kondisi permukaan air tanah yang tinggi, akibat dari salah

pada waktu pelaksanaan dan juga bisa akibat kesalahan perencanaan. Salah satu bentuk kerusakan yang paling sering kita jumpai dan kerusakan tersebut sangat tidak nyaman untuk dilalui adalah kerusakan berlubang jalan, bahkan jalan yang bisa menyerupai kubangan kerbau. Jelas penyebab utamanya adalah air yang menggenangi jalan. Daya dukung tanah pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada dalam tanah tersebut. Oleh karena itu hampir setiap selesai musim hujan akan kelihatan banyak jalan yang mengalami kerusakan mulai dari lubang kecil hingga lubang yang besar.

Tabel 1.1
Klasifikasi jalan yang ada di Kota Pekanbaru

No.	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota
1.	Jalan Jendral Sudirman	Jalan S.M Amin	Jalan Delima
2.	Jalan H.R Soebrantas	Jalan Arifin Achmad	Jalan Srikandi
3.	Jalan Soekarno – Hatta	Jalan Hang Tuah	Jalan Bukit Barisan
4.	Jalan Tuanku Tambusai	Jalan Diponegoro	Jalan Dt. Setia Maharaja
5.	Jalan Ahmad Yani		Jalan Kapau Sari
6.	Jalan Imam Munandar		Jalan Swakarya
7.			Jalan Taman Karya

Sumber : Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, 2014

Dalam hal ini pengawasan sangatlah penting dan perlukan, karena tanpa adanya pengawasan pembangunan jalan tidak akan berjalan dengan baik. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin komplek dari waktu ke waktu, banyaknya orang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang

baik dan kurang memuaskan, baik organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting diantaranya;

- Perubahan lingkungan organisasi
Berbagai perubahan lingkungan organisasi terus menerus tidak dapat dihindari.
- Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang formal dan lebih hati – hati.

- Meminimalisasikan tingginya kesalahan – kesalahan

Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan.

- Kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri akan berkurang.

- Komunikasi
- Menilai informasi dan mengambil tindakan korektif

Tanpa adanya pengawasan maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tidak akan tercapai dengan lancar dan baik, pengawasan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya tercapainya kesuksesan tugas Pemerintah dalam pembangunan dan pengawasan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak boleh diabaikan untuk menjamin keberhasilan tugas pokok organisasi dan misis suatu organisasi serta demi terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan.

Dengan adanya pengawasan juga dapat mencegah suatu tindakan penyimpangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan, akan tetapi yang terjadi pada saat ini tindakan pengawasan sangatlah kurang dijalankan dan sering menyebabkan terjadinya penyimpangan. Di dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya mengikuti langkah – langkah seperti; menetapkan standar, memberikan penilaian dan

melakukan tindakan perbaikan, akan tetapi sifat dan waktu dalam pengawasan juga perlu diterapkan agar pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan dengan baik. Sifat dan waktu pengawasan tersebut seperti; pengawasan *preventive* dan pengawasan *repressive* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dan sesudah pekerjaan dilaksanakan.

Di dalam pengawasan terdapat beberapa fungsi, fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :

- Tetapkan ukuran – ukuran
- Monitor hasil – hasil dan dibandingkan dengan ukuran – ukuran.
- Perbaiki penyimpangan – penyimpangan
- Ubah dan sesuaikan cara – cara pengawasan sehubungan dengan hasil – hasil pengawasan dan perubahan kondisi – kondisi.
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan

Infrastruktur jalan umum dikelompokkan menurut sistem fungsi, status dan kelas. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Infrastruktur jalan kota pekanbaru banyak yang mengalami kerusakan, bahkan jalan didalam kota pun banyak yang mengalami rusak berat. Jalan yang rusak jika hujan datang dan menutupi jalan yang rusak maka tidak sedikit kecelakaan akan terjadi. Jalanan penghubung antar kota

pekanbaru keluar daerah juga mengalami rusak sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Disini sangat diperlukan adanya pengawasan agar dalam mengerjakan suatu rencana terealisasi dengan baik, apalagi rencana yang dilakukan adalah membangun infrastruktur jalan kota yang nantinya digunakan oleh semua orang. Adapun fenomena dan fakta – fakta yang terjadi dilapangan yaitu:

1. Diketahui masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki sehingga mengganggu kenyamanan para pemakai jalan.
2. Kerusakan jalan yang terjadi dapat mengakibatkan tingginya kecelakaan pengendara yang melintasi jalan rusak tersebut.
3. Belum optimalnya fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru terhadap jalan yang mengalami kerusakan sebagaimana sesuai dengan rencana Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
4. Kondisi prasarana jalan di Kota Pekanbaru menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru memang lebih tinggi kondisi jalan yang baik dari yang baiknya. Tetapi faktanya jika dilihat dilapangan masih banyak jalan yang dikategorikan rusak.

Berdasarkan fenomena diatas, Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan. oleh karena itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Surandajang (2005:240), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian

apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Tidak berjalan pengawasan menyebabkan tujuan tidak akan berhasil karena adanya celah-celah penyimpangan dan kesalahan yang mungkin bisa terjadi, oleh karena itu pengawasan sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Menurut Manullang (2008:172), mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut.

1. Menetapkan standar pelaksanaan
2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)

Tindakan ini dilakukan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya menyimpang, agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka:

- Pertama-tama haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu
- Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu

- Bila sudah dapat ditetapkan dengan sebabakibat terjadinya penyimpangan baru diambail tindakan perbaikan.

Menurut Winardi (2000:161), terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan yaitu:

- 1) Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda; (maka demikian diperlukan adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisator).
- 2) Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Terry dalam Melayu (2005: 242), tujuan pengawasan adalah:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Supaya tujuan dihasilkan sesuai dengan rencana.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengawasan menurut Silalahi (2003:176), yaitu:

- 1) Menentukan objek yang akan diawasi.
- 2) Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau menggambarkan pengawasan atau menggambarkan pengawasan yang dihendaki.
- 3) Menentukan prosedur, waktu dan tehnik yang digunakan.
- 4) Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan.

- 5) Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apa ada perbedaan.
- 6) Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti.

Kerangka Berpikir

Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kota Pekanbaru. Berdasarkan dari variabel penelitian pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru, dan diukur dengan mengambil salah satu teori yang dijadikan indikator fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, pengawas infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa indicator dan sub indicator menurut teori **Manullang**, yaitu :

1. Proses Pelaksanaan Pengawasan

Proses pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru dilakukan secara bertahap melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan standar
 - Adanya pembagian tugas secara jelas
 - Standar waktu pengawasan
- b. Melakukan tindakan penilaian
 - Menilai kinerja pegawai
 - Mengamati kerjaan pegawai
 - Mengevaluasi kinerja pegawai
- c. Melakukan tindakan perbaikan
 - Memperbaiki apabila terjadi kesalahan
 - Memberikan teguran terhadap penyimpangan

2. Faktor – faktor penghambat infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru

Faktor – faktor penghambat pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Sumber daya manusia
 - Kualitas petugas pengawasan
 - Jumlah petugas pengawasan
- b. Anggaran / biaya
 - Anggaran operasional dalam melakukan pengawasan
- c. Fasilitas
 - Sarana dan prasarana (kendaraan operasional)

Metode

Teknik yang digunakan penulis ini adalah teknik analisis Deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya berdasarkan hasil penelitian yaitu Pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Kriteria dalam memilih *key informan* dalam penelitian ini adalah mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Adapun yang dijadikan *informan* yang dianggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan yang dapat dipercaya dengan diawasi oleh Kepala bagian pengawasan dari informan tersebut dan ditambah lagi dengan informan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tidak seimbang dengan infrastruktur yang memadai, salah satunya infrastruktur jalan yang semakin difokuskan pembangunannya karena semakin lajunya tingkat kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru pada saat ini. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap sesuatu yang dikerjakan agar rencana dan tujuan tercapai dengan lancar. Dalam hal ini fungsi pengawasan sangatlah penting karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran dalam suatu proses pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan jalan di Kota Pekanbaru adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengembangan jalan. Di dalam melakukan pengawasan jalan di Kota Pekanbaru Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru khususnya bagian Bina Marga dalam pelaksanaannya merupakan kegiatan untuk menjaga kenyamanan pengendara yang melintasi sepanjang jalan yang ada di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui pengawasan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru bagian Bina Marga, dapat dilihat dari beberapa sub indikatornya, yaitu :

a. Menentukan Standar

Dalam menetapkan standar yang dilakukan dalam penelitian adalah

kegiatan – kegiatan yang harus dilakukan oleh Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Adanya pembagian tugas secara jelas

Adapun standar yang diterapkan dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru seperti melakukan kegiatan yang jelas yaitu memeriksa kondisi infrastruktur jalan dimana dalam pembagian tugasnya berdasarkan golongan dan pendidikan.

Berikut kutipan wawancara dengan kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru mengenai pembagian tugas bagi pengawas dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru

“kegiatan yang kami lakukan dalam melakukan pengawasan terhadap jalan – jalan yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan pembagian tugas yaitu dengan golongan dan pendidikan karena tidak semua pegawai yang berbasic teknik.” (wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru, 19 November 2014).

- Standar waktu

Standar waktu adalah penentuan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru didalam melakukan pengawasan infrastruktur jalan. Standar waktu dalam melakukan pengawasan jalan – jalan di Kota Pekanbaru dilakukan 1 bulan sekali.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru. Mengenai standar waktu dalam pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

“mengenai standar waktu yang kami tentukan untuk melakukan pengawasan jalan – jalan di Kota Pekanbaru yaitu 1 bulan sekali kami memantau jalan – jalan tersebut, dan masa pemeliharaan selama 6 bulan, sedangkan waktu melakukan pengawasan pada saat jalan tersebut dibuat kami melakukannya setiap hari selama jalan tersebut dibuat.” (wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 19 November 2014).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas mengenai standar waktu yang ditentukan dalam melakukan pengawasan waktunya 1 bulan sekali dan masa pemeliharaan selama 6 bulan, tetapi yang terjadi pada jalan di Kota Pekanbaru seperti tidak ada sama sekali dilakukan pengawasan, karena masih banyaknya jalan – jalan di Kota Pekanbaru yang rusak parah dan tidak secepatnya untuk dilakukan perbaikan.

b. Melakukan tindakan penilaian dan evaluasi

Melakukan penilaian disini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan standar ukur dan petunjuk – petunjuk arahan. Adapun sub indikator yang menjadi proses melakukan tindakan

penilaian dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- Menilai kinerja pegawai

Didalam menilai hasil kerja pegawai sangat ditentukan oleh beberapa hal, apakah pegawai tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur atau tidak. Sistem penilaian terhadap hasil kerja pegawai dapat dilihat berdasarkan waktu, volume, mutu dan kualitas yang telah dikerjakan dilapangan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru. Mengenai waktu yang digunakan dalam pengerjaan jalan di Kota Pekanbaru.

“waktu yang digunakan dalam pengerjaan jalan ini kami berikan waktu 150 hari atau 5 bulan, apabila waktu yang diberikan lewat kami akan memberikan sanksi, dan waktu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan jalan selama 1 bulan sekali.” (wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 19 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara, dalam sistem penilaian terhadap hasil kerja dilihat berdasarkan waktu, volume, mutu dan kualitas yang telah dikerjakan dilapangan.

- Mengevaluasi kinerja pegawai

Mengevaluasi kinerja pegawai, sama halnya dengan memberikan penilaian terhadap pegawai tersebut untuk mengukur kinerja para pegawai, bertujuan untuk mengetahui hasil kerja

yang telah dilakukan para pegawai tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas mengenai bagaimana cara mengevaluasi kinerja pegawai dilakukan pada saat diadakannya rapat, pada saat rapat tersebutlah akan dievaluasi bagaimana system kerja pegawai selama ini, dan menurut wawancara diatas rapat hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan saja.

- Mengamati kerjaan pegawai

Mengamati kerjaan pegawai tentunya harus dilakukan oleh seorang pimpinan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut wawancara dengan kepala seksi diatas mengenai pembagian tugas dalam mengamati kerjaan pegawai tersebut dibagi atas struktur organisasi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Jadi pembagian tugas tersebut tidak sembarangan dalam membagi tugas karena ada pembagian struktur organisasinya yang berjenjang.

c. Melakukan tindakan perbaikan

Yaitu tindakan yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan apabila memang terjadi kesalahan atau penyimpangan akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Tahap dalam melakukan tindakan perbaikan ini terbagi dalam sub indikator yaitu :

- Memperbaiki apabila terjadi kesalahan dan memberi peringatan

Didalam pengawasan infrastruktur jalan yang ada di Kota Pekanbaru apabila terjadi kesalahan maka akan diberikan peringatan bahkan

diberikan sanksi sesuai dengan Undang – Undang tentang Kepegawaian.

Berikut kutipan wawancara dengan kepala bidang perencanaan dan pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru *“penambahan jumlah pengawas dilakukan apabila kiranya pengawas – pengawas kami yang ada kurang cukup dan sering melakukan kesalahan ataupun kelalaian, ataupun dengan memberikan peringatan berupa sanksi sesuai dengan UU Kepegawaian dan apabila terjadi kerusakan dalam pengerjaan jalan akan diberikan waktu selama 180 hari saja.”* (**wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 19 November 2014**).

- Memberikan sanksi / teguran terhadap penyimpangan

Tindakan yang dilakukan apabila petugas pengawas melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dalam memantau kondisi jalan di Kota Pekanbaru yaitu pemberian teguran maupun sanksi, hal ini dimaksud agar pengawas tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru. Mengenai tindakan pemberian sanksi terhadap petugas pengawas.

“memang apabila petugas pengawas yang melakukan pengawasan jalan melakukan kesalahan atau kelalaian bekerja akan kami berikan teguran, teguran yang pertama adalah teguran secara lisan dengan cara menyampaikannya langsung terhadap si pengawas, dan apabila si petugas pengawas melakukan kesalahan yang

kedua kali akan kami berikan sanksi administrasi dan apabila melakukan kesalahan untuk yang ketiga kalinya, sanksi tersebut berupa penundaan kenaikan pangkat sesuai dengan PP No.80 tentang Pegawai Negeri.” (**wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 19 November 2014**).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas mengenai pemberian sanksi apabila melakukan tindakan kesalahan, memang dijalankan yaitu diberikan sanksi administrasi dan apabila kesalahan yang dilakukan sudah fatal dan berulang kali akan diberikan sanksi berupa penundaan pangkat sesuai dengan PP No. 80 tentang Pegawai Negeri.

2. Faktor – faktor Penghambat Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan infrastruktur jalan tersebut, di antaranya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat pengawasan infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru, artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Dari indikator Sumber

Daya Manusia terbagi lagi beberapa sub indikatornya, yaitu jumlah petugas pengawasan dan kualitas petugas pengawasan.

Penjelasan mengenai keadaan tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan kepala bidang perencanaan dan pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

“Mengenai jumlah petugas yang ada pada saat ini memang bias dikatakan masih kurang, apalagi petugas dalam melakukan pengawasan ke lapangan memang sangat kurang. Adapun petugas yang melakukan pengawasan ke lapangan bukanlah sembarang petugas, karena yang ditugaskan untuk turun ke lapangan adalah petugas yang mengerti bagaimana kondisi jalan apakah sudah sempurna atau belum.” (wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 19 November 2014).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai jumlah SDM yang ada dikatakan masih kurang cukup melihat jumlah jalan yang begitu banyak dan luas yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan jumlah pegawai dari tabel diatas adalah jumlah keseluruhan pegawai yang ada pada bagian Bina Marga yaitu hanyalah 37 orang. Dimana jumlah tersebut masih sangat kurang, melihat tugas yang diberikan yaitu untuk melakukan pengawasan. Jika dilihat jumlah para pegawai yang ada masih belum mencukupi apalagi yang paling diutamakan adalah bagian pengawasan, dan juga tugas para pegawai tidak hanya didalam kantor saja melainkan juga harus melakukan turun kelapangan

yaitu untuk melaksanakan pengawasan jalan yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia ini sangatlah berpengaruh didalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Pendidikan formal yang di miliki setiap pegawai sangat menentukan pola pikir pegawai. Semakin tinggi pendidikan pegawai diharapkan semakin tinggi pula sumber daya dan kemampuan intelektual, keberhasilan dalam melaksanakan tugas lebih mudah untuk dicapai. Berikut adalah wawancara mengenai kualitas petugas pengawasan yang ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru.

“kualitas pegawai memang kurang semenjk tidak adanya pelatihan – pelatihan, dulu banyak adanya pelatihan, apalagi tentang jalan sangat minim, dari segi pendidikannya banyak disingkat STM butuh waktu untuk mengambil pendidikan lagi.” (Wawancara dengan Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 20 November 2014).

b. Anggaran / biaya

Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang di inginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakan kebutuhan sehari – hari dalam pemerintahan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya

administrasi umum dan biaya pemeliharaan.

Anggaran Operasional Pegawai Bidang Bina Marga tahun 2014 (Kec. Sail, Sukajadi dan Senapelan)

Belanja pegawai	Volume	Harga satuan	Jumlah 6 = (3x5)
PPTK 1orang x 10 bulan	10,00	500.000,00	5.000.000,00
Pengawas lapangan 2orang x 10 bulan	20,00	300.000,00	6.000.000,00
Staff teknis/admministasi 1orang x 10 bulan	10,00	300.000,00	3.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan			14.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, biaya operasional tiap pegawai yang melakukan pengawasan sebesar Rp. 300.000, yang mana honor tersebut diberikan tiap 5 bulan sekali. Dan setiap satu orang pegawai mengawasi satu jalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari biaya operasional tersebut dapat dikategorikan belum mencukupi dengan kondisi yang ada, karena para pegawai yang melakukan pengawasan ke lapangan masih menggunakan kendaraan pribadi sedangkan tugas yang dilaksanakan adalah tugas untuk kepentingan umum.

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan baik alat - alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Pekerjaan Umum Kota

Pekanbaru juga sangat memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas – tugas pemerintahan agar tercapai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya sarana dan parsarana yang lengkap Dinas Pekejaan Umum Kota Pekanbaru dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan lancar.

Dari sarana dan prasarana yang ada penulis melihat kendaraan yang ada tidak memenuhi syarat dalam melakukan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Mengenai fasilitas yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sangatlah memprihatinkan, karena fasilitas kendaraan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru khususnya bagian Bina Marga hanya memiliki 2 unit mobil. Jumlah kendaraan yang ada sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yang mana para pegawai yang akan turun ke lapangan dalam

mengawasi pembangunan jalan akan menjadi terhambat. Jumlah kendaraan motor menurut tabel diatas hanyalah 3 unit saja, tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis motor tersebut tidak digunakan untuk petugas pengawas, tetapi digunakan untuk kegiatan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru disimpulkan terlaksana masih kurang optimal atau kurang baik. Dimana dikarenakan masih kurang maksimalnya kinerja para petugas atau pelaksana pengawas dalam melakukan pengawasan infrastuktur jalan.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, tentang faktor – faktor penghambat pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa factor tersebut dari beberapa indicator dan sub indicator yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan sub indikatornya yaitu : jumlah petugas pengawas dan kualitas para pengawas. Yang menjadi kendala yaitu jumlah petugas pengawas yang ada pada saat ini sangatlah minim, dari segi kualitas pun masih sangat kurang, petugas pengawas bias dikategorikan kurang baik, belum memiliki skill yang cukup masuk pada kriteria. Terbatasnya anggaran/dana operasional guna pelaksanaan pengawasan serta kurangnya kendaraan operasional atau kendaraan dinas yang digunakan untuk melakukan pengawasan infrastruktur jalan, karena menurut wacana diatas para petugas pengawas bisa dikatakan lambat apabila tidak diberikan kendaraan operasional untuk

melakukan pengawasan infrastruktur jalan yang ada di Kota Paekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, S.A. 2012. *Perencanaan infrastruktur Jalan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anonim. 2007. *Klasifikasi Jaringan Jalan Menurut Fungsi (Peranan) Dan Status (Wewenang Pengaturan)*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga.

Brantas. (2009), *Dasar – dasar Manajemen*, Bandung : Penerbit Alfabet.

Darwis. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*. Pekanbaru: UNRI

Handoko.T.Hani. 2004. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Herujito,H.Melayu. 2005. *Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Manullang. 2006. *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press

Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Sarundajang,H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka

Silalahi,Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep Teori Dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Siagian.S.P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara

Soejito,Irawan. 2000. *Pengawasan Terhadap Perda dan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara

Sugiyono. 2009. *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabetha.

Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum

Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta